

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 menjadi sebuah bencana bagi semua negara di dunia dengan penularan yang begitu cepat dan lebih berbahaya daripada virus-virus yang ada sebelumnya. Awal mula kemunculan virus ini berasal dari daerah Wuhan, Tiongkok. Virus tersebut secara luas menyebar keseluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia, di bulan Maret dua orang dari Indonesia terjangkit virus tersebut yang dibawa oleh seorang warga negara Jepang di Depok, Jawa Barat. Hal ini membuat kegaduhan secara nasional mengingat penularan dari virus tersebut begitu cepat menular kepada orang-orang yang bersentuhan dengan orang yang terkena virus tersebut.

Presiden Jokowi memberikan penjelasan tentang usaha-usaha pemerintah dalam mengantisipasi penularan virus Corona di Indonesia. Dengan cara menjaga ruang masuk ke Indonesia, sebanyak 135 pintu masuk negara dijaga sangat ketat mulai dari laut, darat, dan udara. “Semuanya dijaga ketat meskipun dalam praktiknya ini tidak mudah. Karena ngecek dengan yang namanya apa *thermal scanner* itu kadang-kadang keakuratannya juga tidak bisa dijamin 100%,” (Jokowi dalam Kompas, 2020).

Pandemi menjadi awal keterpurukan diberbagai sektor dan lini yang ada, menjadikan sebuah bencana non-alam yang tidak terduga sebelumnya. Muncul secara tiba-tiba dan tidak ada negara yang siap menghadapinya bahkan sekelas negara adidaya sekaligus seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Secara cepat semua negara mengumumkan *lockdown* ketika warganya terkena virus Covid-19, langkah tersebut diambil mengingat penyebaran virus yang cepat daripada virus yang lainnya.

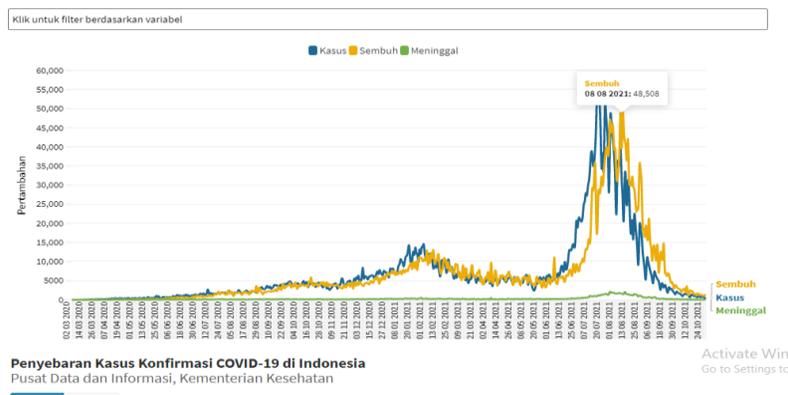
Ciri khas virus Corona berbeda dengan virus lainnya seperti virus kolera, pes, influenza, flu babi, flu burung, dan lain-lain. Virus Covid-19 menyiksa manusia dibandingkan virus yang lainnya. Jika ada satu orang yang tertular maka bukan cuma satu orang itu saja yang diisolasi, tapi seluruh warga masyarakat juga akan terkena isolasi, baik warga yang sedang sakit maupun warga yang dalam kondisi sehat. Isoman atau isolasi

mandiri dilaksanakan guna mencegah penyebaran yang semakin meluas dan menjauhkan virus Corona dari masyarakat banyak. Masalah menjadi semakin serius saat masyarakat dihadapkan dengan posisi ketidakpastian baru. Pandemi Covid-19 menjadi disrupsi sehingga kita perlu mengenali, mengatasi, dan mencegahnya agar ketidakpastian ini segera berakhir (Satria, 2020).

Karakteristik yang seperti itu membuat pemerintah dengan respon yang cepat melakukan berbagai cara supaya virus Corona tersebut tidak mudah menyebar di masyarakat. Meskipun dari masyarakat sendiri banyak yang tidak percaya terhadap virus Corona, mereka masih menganggap jika virus Corona itu sama seperti virus-virus yang lain. Hal tersebut yang membuat pemerintah kurang maksimal dalam penerapan kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat sadar akan bahayanya virus Covid-19 dibandingkan dengan virus-virus lain yang sudah muncul terlebih dahulu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap virus tersebut bisa kita lihat dalam grafik yang ada di paragraph selanjutnya, dimana angka kasus positif mencapai angka tertinggi di Indonesia.

Data harian kasus masyarakat yang terkena virus Covid-19 bisa kita akses melalui *website* Kemenkes, mulai dari jumlah harian orang yang terjangkit virus Corona, data laki-laki dan perempuan yang terpapar virus, jumlah kasus masyarakat yang meninggal, dan lain-lain. Berikut adalah gambar grafik mulai dari awal virus Corona menjangkit masyarakat Indonesia sampai dengan sekarang.

Grafik 1.1 kasus positif, sembuh, dan meninggal



(Sumber: Kemenkes, tahun 2021)

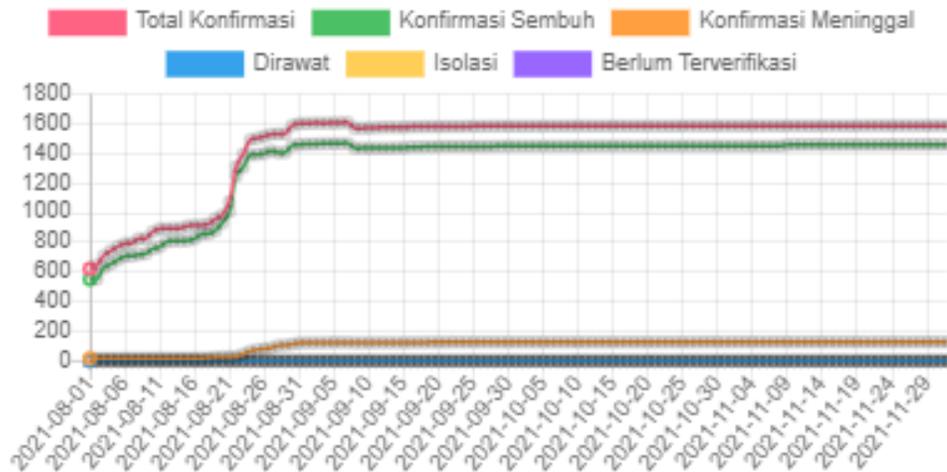
Dilihat dari data grafik yang ada kasus Covid pertama kali muncul di bulan Maret 2020 dengan peningkatan kasus naik setiap bulannya berubah-ubah dan cenderung naik disetiap bulannya. Indonesia mengalami kenaikan yang sangat tinggi terjadi pada Juli jika dilihat dari data grafik yang ada, bisa kita lihat grafik kenaikan pada bulan Juli sangat tinggi dengan menyentuh angka kurang lebih 50 ribu kasus dibulan tersebut. Dengan kasus positif yang tinggi akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang awalnya diterapkan di Jawa-Bali mengingat di kedua tempat tersebut paling banyak jumlah kasus positif Covid-19

Kebijakan publik adalah alur perencanaan, kegiatan, atau tindakan yang diambil oleh pemangku kebijakan (pemerintah desa) seraya mengatasi permasalahan yang bertujuan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Sebuah kebijakan dapat terwujud menjadi peraturan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat tanpa pandang bulu (Ramadhani dan Ramadhani, 2017). Mengeluarkan solusi di masa pandemi tentu membuat masyarakat lega karena ada sebuah langkah strategis oleh pemerintah dengan menerapkan beberapa kebijakan publik dalam penanganan Covid-19. Kebijakan pencegahan penularan Covid-19 diantaranya yaitu PP (Peraturan Pemerintah) No. 21 tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar), KEPRES (Keputusan Presiden) No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KEPRES (Keputusan Presiden) No. 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Melalui intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa atau biasa dijelaskan dengan kata lain adalah sebuah kesatuan hukum yang mempunyai suatu batasan cakupan wilayah berwenang sebagai pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan negara. Dalam mewujudkan Desa yang tangguh dalam penanganan Covid-19, diperlukan sebuah arah tujuan kebijakan yang jelas serta bisa diterapkan didalam elemen masyarakat sebagai implementasi dari kebijakan tersebut.

Masyarakat sekarang harus beradaptasi dengan situasi yang ada dengan mengubah pola hidup yang lebih sehat. Dengan cara melakukan kegiatan atau pola-pola hidup baru dengan menerapkan kedisiplinan menjaga protokol kesehatan dengan bertujuan agar terhindar dari virus Corona dan mengurangi penularan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Persoalan tersebut sering kita jumpai di masyarakat sekitar kita, salah satunya masih minimnya rasa kesadaran masyarakat terhadap virus tersebut. Rasa kepedulian masyarakat dan pengetahuan mengenai ancaman nyata dari Covid-19 juga rendah, di banyak tempat sering kita temukan masyarakat yang masih tidak disiplin terhadap protokol kesehatan. Salah satunya yaitu masyarakat tidak memakai masker ketika keluar rumah atau berpergian, ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang mendapatkan edukasi yang baik.

Grafik 1.1 total konfirmasi, konfirmasi sembuh, konfirmasi meninggal, dirawat, isolasi, dan belum terverifikasi di wilayah Bumiayu



(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, tahun 2021)

Melihat grafik diatas dan dibandingkan dengan grafik lain yang ada di website dinkes Brebes dengan perbandingan grafik yang ada, wilayah Bumiayu tergolong wilayah dengan kasus konfirmasi positif yang cukup tinggi. Ada sekitar 1600an kasus konfirmasi positif dari sekitar 16.335 penduduk yang berada di wilayah desa Bumiayu, jumlah kasus terkonfirmasi positif di wilayah Bumiayu menjadi perhatian khusus tersendiri. Mengingat wilayah Bumiayu menjadi pusat ekonomi dari Brebes Selatan dimana semua arus mobilitas dari wilayah-wilayah sekitarnya berpusat disana.

Melihat dari kondisi geografis atau letak wilayah Bumiayu yang mempunyai arus mobilitas yang tinggi, menjadikan wilayah Bumiayu menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus positif covid-19 tertinggi kedua setelah wilayah Brebes yang pertama. Dengan alasan tersebut peneliti menjadikan alasan itu menjadi objek penelitian mengingat jumlah konfirmasi positif covid-19 yang tinggi di wilayah tersebut.

Banyak masyarakat yang melanggar peraturan PPKM yang sudah diterapkan di seluruh Indonesia terkhusus wilayah Jawa-Bali. Pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut lebih kepada kesadaran masyarakat yang rendah seperti tidak memakai masker

dan masih berkerumun di tempat-tempat umum. Pelanggaran itu yang membuat Bumiayu mempunyai kasus covid-19 yang tinggi, ini menjadikan kasus tersebut sebagai fokus penelitian.

Kedisiplinan tersebut menjadi penting agar menekan angka kasus positif atau penularan Covid-19, penegakan akan protokol kesehatan seharusnya menjadi konsentrasi penuh pemerintah desa mengingat masyarakat di pedesaan yang kurang disiplin terhadap protokol kesehatan. Sangat penting menjaga pola hidup masyarakat yang sehat dengan tujuan untuk kesehatan bersama, terkhusus sebagai sebuah upaya pemutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Diperkuat dengan hasil literature riview yang didapatkan dari berbagai jurnal penelitian dan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kebijakan dari pemerintah pusat serta pemerintah yang lebih kecil yaitu pemerintah desa dalam penanganan Covid-19. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan membahas secara detail sejauh mana upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bumiayu dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Hal yang menjadikan penelitian ini menarik salah satunya karena adanya kegiatan 3T (Tracking, Testing, Treatment) yang dilakukan oleh satgas covid-19 desa kegiatan tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran virus covid-19 sejak dini. Inilah salah satu alasan kenapa penelitian ini dilakukan dan memfokuskan kepada implementasi kebijakan PPKM yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bumiayu.

Rumusan Masalah

Dari hal-hal yang diuraikan dalam Latar Belakang Masalah Penelitian, maka Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan PPKM mikro di desa Bumiayu dalam penanganan covid-19 tahun 2021?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan PPKM mikro di desa Bumiayu dalam penanganan covid-19 tahun 2021?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini bertujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses Implementasi yang mencakup pola kerja interaksi antar organisasi atau aktor implementer, kompleksitas dan problematika dalam proses implementasi Kebijakan PPKM mikro di Desa Bumiayu.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi kegagalan atau sebuah keberhasilan dari implementasi kebijakan PPKM di Desa Bumiayu
3. Untuk memberikan hasil studi kepada pembaca sebagai tanda bahwa studi implementasi kebijakan masih relatif dan memiliki urgensi untuk dilakukan pada masa sekarang.

Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui sejauh apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa Bumiayu dalam penanganan pandemi Covid-19.
2. Untuk memahami proses-proses dari keluarnya sebuah kebijakan yang diambil dalam penanganan pandemic Covid-19.

3. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya atau bahan studi ilmu pemerintahan khususnya dalam pengambilan kebijakan terhadap permasalahan yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Agar menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang cepat dan tepat terhadap bencana yang datang secara tiba-tiba seperti Covid-19.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat mengetahui informasi tentang datangnya bencana pandemi Covid-19 dan mempersiapkan diri dengan datangnya bencana tersebut dan pemerintah memberikan solusi-solusi kebijakan yang lengkap.

Tinjauan Pustaka

Peneliti ini menggunakan 10 *literature review* yang memiliki permasalahan yang berbeda hal ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan implementasi kebijakan PPKM yang lebih baik, khususnya dalam penanganan covid-19 di Desa Bumiayu, Kabupaten Brebes.

- a. Implementasi Kebijakan

Jurnal implementasi kebijakan saya ambil dari beberapa peneliti seperti (Jenifer & Ismail, 2021), (Nabilah, Nisa, Intan, Sania, Rifqi & Emi, 2020), (Bambang, 2020), (Dian, 2020), dan (Perbawa, 2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di

Kecamatan Pineleng”, “Menyikapi Pandemi Versi Desa Tangguh Covid-19: Implementasi Inovasi Kebijakan Publik Perumahan Graha Tirto Asri Kabupaten Pekalongan”, “Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosialisasi Berskala Besar (PSBB) sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”, “Inovasi Kebijakan Desa Tangguh Covid-19 di Kabupaten Bangka”, dan “Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perarem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19”. Dimana pada hasil penelitian ini menempatkan kebijakan publik sebagai sebuah serangkaian keputusan menyangkut kepentingan masyarakat, yang sadar, terkonsentrasi, dan tersistematis yang dikerjakan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan di bidang-bidang tertentu yang mengarah pada suatu tujuan. Implementasi kebijakan PSBB kedepannya perlu lebih memperhatikan aspek masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan cara antara lain yaitu memberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai pemahaman akan manfaat kebijakan PSBB baik bagi warga masyarakat itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas, sehingga diharapkan akan memunculkan keinginan dan kemampuan dari setiap warga masyarakat untuk melaksanakan kebijakan PSBB dengan baik.

Perbedaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti sekarang terletak pada tempat yang akan diteliti, dimana tempat penelitian yang akan saya lakukan terletak di desa Bumiayu, kabupaten Brebes.

b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Jurnal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini saya ambil dari peneliti (Mawar, Lusi, Armyn, dan Khofifah, 2021), (Wahyudin & Titi, 2021), dan

(Salbiah, Hamdie, dan Junaidy, 2021) Judul penelitian “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia Mawar”, “Pulih dari Covid melalui Psikologi: Studi Kasus PPKM Di Indonesia”, dan “Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu”. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, kebijakan PPKM telah memberikan dampak dalam hal berinteraksi sosial. Masalah baru yang datang seperti angka pengangguran yang naik karena terkena PHK imbas dari penerapan kebijakan PPKM. Di lain hal jumlah pengemis, anak jalanan, tunawisma, dan geelandangan semakin bertambah karena permasalahan didalam rumah tangga dengan himpitan ekonomi menjadi salah satu penyebabnya.

Perbedaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti sekarang terletak pada penerapan kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah desa Bumiayu sebagai tempat yang akan saya teliti dengan melihat keadaan diberlakukannya kebijakan PPKM tersebut sebagai antisipasi guna mencegah penyebaran virus corona.

c. Covid-19

Tinjauan pustaka ini berfokus pada kajian-kajian mengenai virus covid-19 yang diteliti oleh penelitian terdahulu. Adapaun beberapa peneliti sebelumnya (Akhirul, Myrtati, Latif & Emei, 2021) dengan judul “Propaganda dan Teori Konspirasi: Wacana Masyarakat terhadap Covid-19 di Indonesia”. Ada juga penelitian dari (Selvi & Taufik, 2020) berjudul “Covid-19: Struktur Masalah dan Pendekatan Kebijakan”. Berdasarkan dari dua penelitian sebelumnya, masyarakat

banyak yang tidak percaya bahwa virus covid-19 itu nyata adanya. Masyarakat banyak yang termakan oleh teori konspirasi karena mereka kebanyakan melihat berita-berita mengenai covid-19 melalui media sosial. Pemberitaan teori konspirasi diawal munculnya covid-19 lebih cepat sampai di masyarakat, teori konspirasi menyebar begitu cepat diberbagai situs digital dan di berbagai platform media sosial. Masyarakat begitu percaya pada informasi yang mereka yakini, meskipun informasi itu tidak ada bukti empiris disertai dengan data.

Tabel 1.5 Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti	Tema Penelitian	Hasil Temuan
Jenifer Aprilia Enjaurau, Ismail Sumampow, dan Gustaf Undap.	<i>“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Pineleng”.</i>	Aspek keberhasilan dalam letak pengambilan keputusan pada pelaksanaan protocol kesehatan terletak pada pebegakan disiplin protocol kesehatan.
Ummu Nabilah, Nia Karimatun Nisa, Intan Fatimah Tuzzaroh, Sania Tafryda, Muhamad Lutfan Rifqi, dan Emi Pudjiastuti.	<i>“Menyikapi Pandemi Versi Desa Tangguh Covid-19: Implementasi Inovasi Kebijakan Publik Perumahan Graha Tirti Asri Kabupaten Pekalongan”.</i>	Perumahan Graha Tirta Asri Desa Tanjung Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan kriteria ketangguhan dan implementasi inovasi desa tangguh Covid-19.
Dian Herdianan	<i>“Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”.</i>	Kebijakan PSBB diharapkan lebih memperhatikan aspek masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan memberikan edukassi mengenai pemahaman akan manfaat PSBB baik bagi masyarakat itu sendiri maupun masyarakat secara luas.
Bambang Ari Satria	<i>“Inovasi Kebijakan Desa Tangguh Covid-19 di Kabupaten Bangka”.</i>	Pelaksanaan inovasi desa tangguh Covid-9 di Kabupaten Bangka,

		inovasi desa tangguh itu di dukung penuh oleh masyarakat lokal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
Sukmawati Lanang P Perbawa	<i>“Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Perarem Desa Adat dalam Penanganan Covid-19”</i> .	Propinsi Bali selain kebijakan pemerintah daerah juga sudah dikeluarkan, dengan bekerja sama dengan Majelis Adat Propinsi Bali untuk melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dimana ruang lingkup yang diatur dalam Perarem.
Mawar, Lusi, Gultom, dan Khofifah	<i>“Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia”</i> .	Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya menanggulangi semakin meluasnya penyebaran virus covid-19 berdampak sangat luas. Salah satu upaya yang terus dilakukan seperti jaga jarak, dan memakai masker tapi realitasnya memberikan dampak yang besar terhadap aspek sosial dan ekonomi.
Wahyudin dan Titi	<i>“Pulih dari Covid-19 melalui Psikologi: Studi Kasus PPKM di Indonesia”</i>	Hasil penelitian menunjukan perkembangan tiga orang terpapar covid-19 terlihat mengalami pemulihan hingga dinyatakan negative covid. Sejak dinyatakan positif covid-19 hingga empat belas hari berselang akhirnya

		ketiga pasien dinyatakan pulih melalui penguatan psikologis.
Salbiah, Hamdie, dan Junaidy	<i>“Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu”</i>	Faktor pendukung dari kebijakan PPKM Mikro di Kecamatan Tanah Bumbu seperti tersedianya dana untuk PPKM Mikro, sumber daya manusia yang melimpah, dan kepatuhan masyarakat terhadap protocol kesehatan.
Aminullah, Artaria, Fianto, dan Setiamandani.	“Propaganda dan Teori Konspirasi: Wacana Masyarakat Terhadap Covid-19 di Indonesia”	Covid-19 didramatisasi sebagai peristiwa yang penuh dengan konspirasi para elit ekonomi dan politik demi kepentingan kapitas. Propaganda teori konspirasi Covid-19 disebarakan melalui internet dan media sosial. Orang percaya teori konspirasi karena ingin mengontrol dan kendali atas kehidupan mereka.
Meilinda dan Taufik	Covid-19: Struktur Masalah dan Pendekatan Kebijakan	Salah satu indicator meredanya isu Covid-19 adalah meratakan kurva pandemic, dengan menggunakan asumsi menekan jumlah orang yang terinfeksi agar tidak meningkat sehingga sistem kesehatan rumah sakit diharapkan tidak over kapasitas dan dapat melayani pasien dengan seoptimal mungkin.

Perbedaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti sekarang terletak pada tempat yang akan diteliti, dimana tempat penelitian yang akan saya lakukan terletak di desa Bumiayu, kabupaten Brebes.

Berdasarkan kajian tinjauan pustaka diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan kebijakan di masa darurat seperti sekarang ini begitu penting mengingat pandemi Covid-19 belum pernah menyerang Indonesia sebelumnya. Pemerintah pusat ataupun pemerintah desa melakukan pengeluaran kebijakan yang diambil dalam mengatasi pandemi. Kesamaan penelitian terdahulu dan juga penelitian ini adalah sama-sama meneliti dengan fokus pengambilan kebijakan publik dalam penanganan pandemi Covid-19 terutama pemerintah desa. Namun perbedaan yang signifikan adalah perbedaan pada fokus implementasi kebijakan yang diteliti dalam penelitian ini adalah terkait dengan strategi kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid-19, fokus terhadap strategi kebijakan yang dikeluarkan.

Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Implementasi Kebijakan

Pemahaman pada implementasi dapat dikaitkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang harus berorientasikan pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya. Kebijakan bisa dikatakan berhasil jika kemanfaatannya telah dijalankan terhadap kebijakan yang sudah diterapkan, implementasi merupakan kegiatan yang paling utama dalam melakukan semua proses yang sedang berlangsung dengan didasari pada peraturan dan kebijakan.

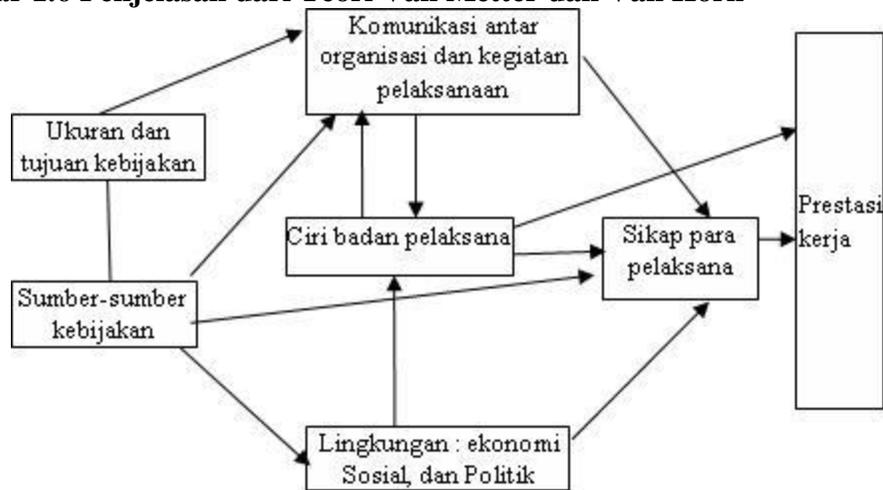
Menurut Agostino (2010:154) dalam (Justifay Manan Putra, 2017), penelitian terdahulu menjabarkan bahwasannya terdapat enam variable implementasi

yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja terdapat sebagai berikut:

- 1) Ukuran & Tujuan Kebijakan. Dalam ukuran ini terdapat sebuah kinerja pada implementasi kebijakan sehingga ukuran dan kebijakan dapat terukur dari keberhasilannya, melihat dari tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan berkembangnya kontribusi penting yang dibuat masyarakat untuk pengembangan (sosio-kultur) yang berada di level pelaksana kebijakan.
- 2) Sumberdaya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga dipengaruhi pada sumber daya yang tersedia, khususnya terdapat sumber daya manusia sebagai agen dari pelaksana sebuah jalannya roda kebijakan.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana. Karakter agen pelaksana tertuju pada fokus dan kinerja dari agen pelaksana tersebut. Karakter ini mencakup pada orientasi organisasi formal dan organisasi informal yang melibatkan pada pengimplementasian kebijakan (publik) yang dalam penerapannya banyak dipengaruhi melalui para agen pelaksananya. Selain dari itu cakupan implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan untuk dapat menentukan agen pelaksana. Maka semakin kompleks cakupan implementasi kebijakan tersebut, maka dapat disimpulkan akan semakin besar juga agen yang dilibatkan.
- 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana. Sikap dari penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh para penggerak pelaksana (pelaksana kegiatan) akan dapat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya pada kinerja dari implementasi kebijakan publik itu sendiri. Hal ini bisa di lihat pada agen pelaksana kebijakan yang mengenal betul pada pada persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

- 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi memang sangat penting sebagai strategi yang ampuh dalam berjalannya mekanisme implementasi kebijakan publik. Tolak ukur yang di dapat dari adanya sebuah koordinasi komunikasi yang bagus, dilihat dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses implementasi bisa mengutarakan pernyataannya dari proses yang dijalaniannya.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Berada dilingkungan ekosospol adalah cara lain dari pendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwasannya Van Metter dan Van Horn mengutarakan pada sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung dari keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan ekosospol yang berjalan tidak kondusif dapat menjadi faktor penghambat dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Gambar 1.6 Penjelasan dari Teori Van Metter dan Van Horn



(Sumber: Researchgate.net)

Penelitian Cleaves (Nofriandi, 2017) menjabarkan dalam penelitiannya “penerapan implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses dari tindakan administrasi dan politik” tentu dalam mewujudkan suatu dari pemikiran kita hingga bukti yang sudah terealisasi maka perlunya arah untuk menetapkan tujuan implementasi

publik yang dapat di realisasikan sebagai hasil dari sebuah trobosan baru pemerintah. Proses dari keseluruhan dalam penetapan kebijakan baru bisa dimulai jikalau tujuan dan sasaran yang bersifat umum telah usai di perinci.

Implementasi juga lebih interaktif dibandingkan proses kebijakan sebelumnya, seperti formulasi dan legitimasi, yang dinilai oleh Federal Program di Oakland, California, Jeffrey L. Pressman dan Aaron B. Wildavsky di Jones. Definisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi dapat dianggap sebagai interaksi antara serangkaian tujuan dan tindakan yang mampu mencapainya, dengan demikian implementasi atau implementasi program telah menjadi jaringan yang tidak terlihat, aplikasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan lain. Dalam rantai kausal yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Menurut (Fatturahman, 2016) implementasi kebijakan menekankan pada suatu perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintahan maupun individu atau kelompok swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam suatu putusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil dengan diamanatkan oleh putusan-putusan kebijakan tertentu.

Menurut Rondineli dan Chemma dalam (Purwanto, 2015) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah antara lain:

1. Kondisi lingkungan (*enviromtmental conditions*)
2. Hubungan anatar organisasi (*inter-organizational relationship*)
3. Sumber daya (*resource*)
4. Karakteristik institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)

1.6.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu konsep dasar sebuah negara dalam bentuk *regulations* untuk memecahkan suatu masalah publik (Anggara, 2014). Pandangan kebijakan publik menurut para ahli, yang salah satunya disebutkan oleh Carl J. Friedrich, mendeskripsikan bahwa kebijakan merupakan sebuah rangkaian yang memuat sebuah tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, ataupun oleh pemerintah dalam satu lingkup untuk menciptakan suatu tujuan tertentu (Suwitri, 2008). Menimbang dari pernyataan seorang ahli tersebut, hadirnya kebijakan publik merupakan suatu solusi yang dihadirkan pemerintah untuk mengatasi problematika yang beredar di masyarakat. Kebijakan pemerintah sebagai bentuk tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum.

Hakikat dari kebijakan publik salah satunya adalah mengatasi permasalahan yang beredar di masyarakat (Anggara, 2014). Realitasnya kebijakan pemerintah saat ini masih banyak permasalahan ekonomi yang berada dimasyarakat belum terselesaikan. Permasalahan atau problematika yang belum terselesaikan tersebut salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, fenomena social masyarakat terkait permasalahan kemiskinan masih acap kali terjadi. (Ras, 2016) menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul

Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan, bahwa kemiskinan sendiri terbagi menjadi tiga dimensi mulai dari dimensi ekonomi, sosial budaya dan struktur politik.

Menurut (Bridgeman & Davis, 2004) membagi kebijakan menjadi tiga bagian yang saling berkesinambungan yaitu Objektif, tindakan legal atau sah secara hukum dan yang terakhir hipotesis.

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik sebagai tujuan ialah membicarakan persoalan perolehan, pencapaian, keberhasilan yang menyangkut masalah publik. Maksudnya ialah bahwa kebijakan dibuat sebagai bentuk responsi terhadap permasalahan publik dalam upaya mengatasi permasalahan pada objek yang ingin dicapai.

2. Kebijakan publik sebagai perilaku yang legal

Pilihan tindakan kebijakan bersifat legal yang didasarkan pada suatu otoritas dari sebuah sistem pemerintahan. Pada konteks ini artinya kebijakan yang dibuat atas dasar tugas, wewenang dalam rangka membuat sebuah perencanaan, rancangan undang-undang atau aturan pemerintah maupun dalam rangka perencanaan anggaran yang di bahas dan di pertimbangkan di sebuah parlemen.

3. Kebijakan Publik Sebagai Hipotesis

Kebijakan publik sebagai hipotesis dimaknai bahwa sebuah kebijakan sebagai melalui tahapan dasaran teori, model dan hipotesa mengenai sebab dan akibat dari suatu kejadian isu publik. Kebijakan ini berorientasi pada asumsi-asumsi perilaku masyarakat, kebijakan ini mendorong seseorang untuk menciptakan suatu gerakan.

Berdasarkan definisi-definisi penjelasan mengenai kebijakan Menurut (Bridgeman & Davis, 2004) dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan memiliki makna yang sedikit berbeda namun memiliki fungsi yang sama sebagai pengatur. Kebijakan berorientasi pada tujuan, pencapaian dalam keinginan menyelesaikan suatu problem publik. Kebijakan berorientasi pada arah atau alur pembuatannya yang di pimpin langsung oleh sistem pemerintahan yang dimana membuat suatu kebijakan adalah suatu hal yang legal, baik itu tahap perancangan undang-undang, anggaran serta pembuatan sebuah keputusan. Kebijakan sebagai hipotesa berorientasi hanya fokus pada asumsi-asumsi belaka pada perilaku manusia.

1.6.3. Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah jenis virus baru (Zulva, 2020) yang ditemukan pertama kali pada tahun 2019 dan belum pernah teridentifikasi menyerang manusia selama ini (World Health Organisation, 2019). Penyakit covid-19 merupakan virus yang menular disebabkan oleh sindrom atau penyakit pernapasan berat coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2) (Setiawan, 2020). Virus covid-19 menular secara cepat membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus ini menjadi pandemi.

Beberapa langkah cepat dikerjakan melalui pemerintah supaya pandemic covid-19 atau virus tidak menular begitu cepat, seperti mewajibkan masyarakat memakai masker, work from home (WFH), social distancing, dan lain-lain (Tursina, 2020). James L. Heskett dalam buku Nassim Nicholas Taleb (2007) menjelaskan bahwa dalam peristiwa covid-19 ini mengingatkan bahwa fenomena pandemic covid-19 ini mempunyai karakteristik dari The Black Swan, yaitu: kelangkaan, dampak ekstrem, dan restropektif (meskipun tidak prospektif) serta kemampuan untuk menyiapkan vaksin belum nisa.

Tidak hanya teori dari Taleb saja, Laurue Garret tahun 1994 memprediksi bahwa manusia akan berbondong-bondong memperebutkan sumber daya langka bersama mikroba. Ramalan Garret memberi kita kesempatan untuk berpikir tentang bahaya mengabaikan pandemic diawal kemunculan ketika mobilitas manusia antar negara bukan lagi rasional, tapi irrasional.

Definisi Koseptual

1.7.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu proses perumusan-perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk menghasilkan suatu kebijakan guna diterapkan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah sebagai bentuk tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum. Kebijakan berorientasi pada tujuan, pencapaian dalam keinginan menyelesaikan suatu problem publik. Kebijakan berorientasi pada arah atau alur pembuatannya yang di pimpin langsung oleh sistem pemerintahan yang dimana membuat suatu kebijakan adalah suatu hal yang legal, baik itu tahap perancangan undang-undang, anggaran serta pembuatan sebuah keputusan.

1.7.2. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia secara cepat dan belum pernah menyerang manusia sebelumnya. Virus menular ini disebabkan oleh sindrom atau penyakit pernapasan berat coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2).

1.7.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi,

khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu bagian yang mempunyai fungsi untuk membatasi dan memperjelas tujuan dari masalah. Dalam hal ini peneliti akan memasukan indikator implementasi kebijakan dalam melaksanakan sebuah program kebijakan.

Beberapa indikator didalam teori implementasi kebijakan yang saya pakai ada 3 dari 6 indikator yang saya pakai, saya memilih 3 indikator tersebut karena lebih mendekati dalam penelitian saya. Indikator tersebut saya masukan kedalam tabel beserta parameter disetiap indikatornya.

Tabel 1.8 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn (Justifay Manan Putra, 2017)	Ukuran dan tujuan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan sebagai ukuran untuk melihat kebijakan itu berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan dari kebijakan itu.
	Karakteristik agen pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi formal dan organisasi informal menjadi pembantu dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro untuk mengurangi penyebaran terhadap virus corona. - Cakupan implementasi kebijakan agen pelaksana sebagai pengingat terhadap masyarakat.

	Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh satgas covid-19 dibantu oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PPKM mikro. - Aktivitas pelaksana dalam menjalankan tugasnya sebagai satgas covid-19.
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PPKM Rodinenelli dan Chemma (Purwanto, 2015)	Sumber Daya (<i>resources</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa Bumiayu - Fasilitas pendukung yang ada di desa Bumiayu
	Kondisi Lingkungan (<i>environmental conditions</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi lingkungan sosial di desa Bumiayu - Kondisi lingkungan geografis di desa Bumiayu

Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif menurut Bogdan & Taylor sebagaimana dikutip dalam (Dr. Farida Nugrahani, 2017) adalah penelitian kualitatif sebagai panduan yang ingin diteliti untuk dapat memperoleh data data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari subjek dan fenomena yang diteliti untuk mendapatkan data yang ilmiah. Sedangkan menurut (Madekhan, 2019) menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan sebuah upaya yang digunakan untuk mengintreprestasikan realitas kehidupan berdasarkan pada pemahaman dari sang peneliti. Metode kualitatif ini digunakan untuk

mencari dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan.

1.9.2 Jenis Data

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan dua jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang di peroleh merupakan hasil informasi yang didapatkan dan di hubungkan dengan penelitian yang diangkat:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara eksklusif dari subjek utama atau bisa dikatakan orang yang terlibat secara langsung (Moha & sudrajat, 2019). Sumber dari data primer bisa didapatkan melalui wawancara secara individu kepada narasumber yang sesuai dengan tema penelitian yang nantinya menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, atau dengan arti lain data yang diperoleh melalui *platform* media sosial, situs web, dan lain-lain (Pratiwi, 2017). Data sekunder disini dihadirkan untuk mendukung data dari data primer sesuai dengan pokok permasalahan yang di bawa peneliti.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Pada penelitian kali ini dilakukan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Desa Bumiayu dan institusi yang berkaitan untuk menghimpun data terkait implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di desa bumiayu dalam penanganan covid-19 tahun 2021.

1.9.4 Unit Analisa Data

Melihat penjelasan yang diutarakan diatas maka unit analisa pada penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Bumiayu, serta masyarakat desa Bumiayu.

1.9.5 Teknik Analisa Data

Dalam penyusunannya peneliti menggunakan tiga tahapan dalam menganalisis data yaitu data reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk lebih rinci dalam penarikan data tersebut akan di paparkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data disini dimaksud untuk menyederhanakan dan menitik fokuskan data-data yang telah di dapat sesuai dengan fokus pada yang di teliti oleh peneliti. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilah serta meorientasikan pada satu tujuan agar penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan lebih mudah di cerna oleh pembaca.

2. Penyajian Data

Selanjutnya setelah melakukan dari reduksi data yaitu masuk kedalam tahapan menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian menggunakan teks naratif dilampirkan dalam bentuk foto atau gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang sudah diperoleh oleh peneliti, maka peneliti memasuki tahapan verifikasi data untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat hipotesis dan bisa mengalami perubahan, maka dari itu apa bila kesimpulan didukung dengan data yang aktual/valid maka kesimpulan teersebut dapat bersifat tetap, sebab itu pada

kesimpulan ini dibuat untuk dapat memecahkan rumusan masalah dan sehingga pada penelitian ini dapat optimal dalam pencapaiannya.